

**LAPORAN AKHIR  
KKS PENGABDIAN**



**JUDUL**

**DAMPAK HUTAN TANAMAN INDUSTRI BAGI MASYARAKAT  
DESA PAYU KECAMATAN MOTILANGO**

**Oleh**

**Nirwan Junus, SH., MH, NIDN. 0002066906 Ketua Tim Pengusul**

**Ismail H.Tomu, SH.,MH, NIDN. 0017067706, Anggota**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KKS PENGABDIAN SEMESTER GENAP T.A.2015/2016**

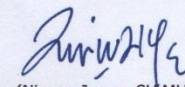
1. Judul Kegiatan : DAMPAK HUTAN TANAMAN INDUSTRI BAGI MASYARAKAT DESA PAYU KECAMATAN MOTILANGO
2. Lokasi : Desa Payu Kec.Motilango Kab.Gorontalo
3. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama : Nirwan Junus, SH.MH
  - b. NIP : 196906022000032001
  - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala / 4 a
  - d. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum
  - e. Bidang Keahlian :
  - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 085256320906
  - g. Alamat Rumah/Telp /Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota : 1 orang
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Ismail H. Tomu, SH.,MH /
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
  - a. Nama Lembaga / Mitra : Kepala Desa Payu Kec.Motilango Kab.Gorontalo
  - b. Penanggung Jawab : Yusuf M. Tamani
  - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : Jl. Salim Manumba Desa Payu Kec. Motilango
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 75
  - e. Bidang Kerja/Usaha : Sosialisasi
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNPB 2016
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Hukum



(Mohammad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum)  
 NIP. 197011051997031001

Gorontalo, 14 Oktober 2016  
 Ketua



(Nirwan Junus, SH.MH)  
 NIP. 196906022000032001



Mengetahui/Mengesahkan  
 Ketua LPM UNG  
 (Prof. Dr. Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum)  
 NIP. 196804091993032001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Ringkasan .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Analisis Situasi.....	1
II. Permasalahan Mitra .....	3
III. Solusi Yang Ditawarkan .....	3
BAB II. TARGET DAN LUARAN .....	4
BAB III. METODE PELAKSANAAN .....	5
BAB IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI .....	7
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	8
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	16

## RINGKASAN

Judul Pengabdian adalah ***“Dampak Hutan Tanaman Industri Bagi Masyarakat Desa Payu Kecamatan Motilango”***.

Dampak Hutan Tanaman Industri yang ada di Desa Payu menyebabkan *deforestasi* hutan, di mana hutan hujan tropis primer diganti dengan hutan monokultur seperti Akasia. Perubahan besar dalam penggunaan lahan tersebut berdampak pada kondisi lingkungan dan sosial. Berdasarkan data yang di peroleh, jumlah penduduk di Desa Payu berjumlah 2.128 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

Hutan Tanaman Industri khususnya di Desa Payu diakibatkan oleh konsesi perusahaan skala besar, sebab hutan tersebut tanahnya tidak subur sehingga di jadikan sebagai Hutan Tanaman Industri untuk tanaman tahunan. Di sisi lain, Hutan Tanaman Industri berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati serta konsekuensi negatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal, sehingga sawah-sawah yang ada di sekitar Desa Payu tersebut mengalami kekeringan akibat sedimentasi alih fungsi hutan menjadi Hutan Tanaman Industri. Oleh karena itu, masalah dampak Hutan Tanaman Industri khususnya di Desa Payu membutuhkan perhatian khusus dari aparat pemerintah.

Solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dan Kepala Desa yakni melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat Desa Payu tentang pentingnya mempertahankan hutan untuk kelangsungan hidup masyarakat serta pembuatan PETA batas wilayah Hutan Tanaman Industri.

***Kata Kunci: Dampak, HTI, Masyarakat.***

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga laporan hasil Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG Periode 2016 ini dapat di selesaikan. Laporan ini berisi tentang keseluruhan rangkaian program mulai dari tahap awal hingga akhir pelaksanaan Kuliah Kerja Sibermas (KKS). Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG ini sangat membantu proses pembelajaran bagi mahasiswa dalam melaksanakan program pengabdian. Selain bermanfaat bagi mahasiswa, pelaksanaan program ini juga sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang berada di Desa Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dalam hal mendapatkan akses pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap dampak positif maupun dampak negatif yang timbul dari Hutan Tanaman Industri.

Kami sebagai tim pelaksana Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG Periode 2016 menyadari bahwa laporan ini memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan pendapat menjadi sangat berguna untuk perbaikan laporan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih.

Gorontalo, Oktober 2016

Tim Pelaksana

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Analisis Situasi

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>1</sup>

Hutan bagi Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Selain itu hutan adalah sumber daya alam penting yang sekaligus berfungsi sebagai sumber keanekaragaman spesies dan genetika, mesin untuk proses, gudang raksasa penyimpan karbon serta stabilator iklim dunia. Hutan juga dapat menjamin ketersediaan pasokan air bersih dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Kekayaan alam yang dimiliki ini tidak akan ada artinya jika kita kurang mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati kekayaan yang dimiliki. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang terdapat pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".Maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>3</sup> Maka

---

<sup>1</sup> Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, 2011, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.3

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Pokok-Pokok Kehutanan*

dari itu dapat dikatakan bahwa hutan adalah penyangga bagi kehidupan manusia yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen sumber daya alam terutama yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan.

Disisi lain, pembangunan industri-industri tidak dapat dihindarkan guna meningkatkan produksi dan menambah lapangan kerja. Namun industri dapat pula mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, sebagai akibat dari tekanan kepadatan penduduk dan dari masalah kemiskinan telah mendorong penduduk di beberapa bagian dari wilayah Negara untuk menggunakan daerah hutan yang seharusnya dilindungi untuk kegiatan pertanian atau untuk kegiatan lainnya seperti Hutan Tanaman Industri. Hasil hutan tanaman industri yang berupa kayu bahan baku *pulp* dan kertas (jenis tanaman akasia) serta kayu pertukangan (meranti). Hutan Tanaman Indonesia di Indonesia mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an. Kebutuhan kayu untuk bahan baku industri di Indonesia tercatat sebesar 50-60 juta m<sup>3</sup> per tahun, sekitar 30 juta m<sup>3</sup> adalah untuk keperluan industri *pulp* dan kertas.<sup>4</sup> Pada tahun 2003 konsumsi kertas mencapai 5,31 juta ton, untuk tahun 2004 kebutuhan konsumsi kertas mencapai 5,40 juta ton. Sedangkan pada tahun 2005 konsumsi kertas mencapai 5,61 juta ton dan prediksi pada tahun 2009 konsumsi kertas dapat mencapai 6,45 juta ton. Indonesia saat ini menduduki peringkat ke Sembilan untuk kategori industri *pulp* dan mengisi 2,4 pasar dunia. Sebagai industri kertas Indonesia menduduki peringkat ke-12 di dunia.

Di Desa Payu sebagian besar hutan di alihfungsikan secara besar besaran sebagai Hutan Tanaman Industri. Ironisnya, alih fungsi hutan itu lebih diakibatkan konsesi perusahaan skala besar seperti HTI, sebab hutan tersebut tanahnya tidak subur sehingga di jadikan sebagai Hutan Tanaman Industri untuk tanaman tahunan.

Hutan Tanaman Industri merupakan salah satu cara pengelolaan hutan dan lahan-lahan kritis dengan penerapan ilmu Silvika untuk meningkatkan produktivitas lahan atau hutan yang tidak produktif dengan tanaman-tanaman kayu sebagai bahan baku industri. Pengelolaan Hutan Tanaman Industri juga merupakan salah satu bagian dari pengelolaan lahan secara *agroforestry*. Pengelolaan Hutan Tanaman Industri ini muncul berdasarkan prinsip untuk memanfaatkan lahan-lahan kritis sehingga tidak terbengkalai, dan kesuburan tanahnya dapat di

---

<sup>4</sup> Epi Syahadat, 2013, Strategi Pembangunan Hutan Tanaman Di Provinsi Kalimantan Timur (*Development Strategy Of Forest Plantation In East Kalimantan Province*), Vol.10, hal.33

kembalikan atau dipulihkan menjadi lahan yang produktif, menjaga kelestarian lahan-lahan kritis, untuk melindungi kerusakan hutan akibat penebangan liar dan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan daerah setempat.

Di sisi lain, dampak HTI yang ada di Desa Payu menyebabkan deforestasi hutan, di mana hutan hujan tropis primer diganti dengan hutan monokultur seperti Akasia. Perubahan besar dalam penggunaan lahan tersebut berdampak pada kondisi lingkungan dan sosial. Perkembangan perkebunan skala besar dapat berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati serta konsekuensi negatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, bisa menyebabkan pencemaran air dan tanah akibat Industri pengelolaan hasil Hutan Tanaman Industri sehingga sawah-sawah yang ada di sekitar desa Payu tersebut mengalami kekeringan akibat sedimentasi alih fungsi hutan menjadi Hutan Tanaman Industri.

Sehubungan dengan hal tersebut, solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dan Kepala Desa Payu yakni melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat tentang pentingnya mempertahankan hutan untuk kelangsungan hidup masyarakat khususnya di Desa Payu.

## **B. Permasalahan Mitra :**

- a. Masyarakat Desa Payu sebagian besar berprofesi sebagai petani, menyebabkan mereka sangat memerlukan irigasi untuk mengairi sawah mereka.
- b. Sawah masyarakat mengalami kekeringan akibat sedimentasi alih fungsi hutan menjadi HTI.

## **C. Solusi yang Ditawarkan**

- a. Mengadakan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat tentang pentingnya mempertahankan hutan.
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Kepala desa Payu Kec. Motilango.
- c. Pembuatan PETA batas wilayah Hutan Tanaman Industri.



## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

#### **A. Target :**

Masyarakat Desa Payu, khususnya yang berada di lokasi areal HTI.

#### **B. Luaran :**

- a. Memberdayakan masyarakat setempat dan menjadikan kemitraan.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah setempat pentingnya pelestarian hutan.
- c. Pembuatan PETA batas luas Hutan Tanaman Industri.
- d. Jurnal.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **A. Persiapan dan Pembekalan**

1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) meliputi tahapan berikut:
  - a) Perekrutan mahasiswa peserta
  - b) Koordinasi dengan Kepala Desa Payu ke Lokasi Kuliah Kerja Sibermas (KKS)
  - c) Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa
2. Materi pembekalan/ *Coaching* kepada mahasiswa mencakup :
  - a) Fungsi mahasiswa dalam KKS oleh Kepala LPM-UNG
  - b) Dampak Hutan Tanaman Industri bagi masyarakat oleh DPL.
  - c) Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat tentang pentingnya mempertahankan hutan.
3. Pelaksanaan tahapan kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) berlangsung dari bulan Februari – April 2016.
  - a) Pelepasan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS) oleh Kepala LPM-UNG
  - b) Pengantaran 30 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS) ke lokasi
  - c) Penyerahan peserta Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS) ke lokasi oleh panitia ke pejabat setempat
  - d) Pengarahan oleh Dosen Pembimbing Lapangan di bantu oleh unsur pemerintah setempat
  - e) Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan
  - f) Monitoring dan evaluasi pertengahan kegiatan
  - g) Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS)
  - h) Penarikan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Sibermas Kuliah Kerja Sibermas (KKS)

## B. Pelaksanaan

Peningkatan pengetahuan hukum masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan membutuhkan kerjasama dengan pemerintah Desa Payu. Solusinya yakni:

- a) Dalam Kuliah Kerja Sibermas (KKS) ini, akan dilakukan sosialisasi dan pendekatan tentang pentingnya mempertahankan hutan.
- b) Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:
  - 1) Mengumpulkan data awal yang ada di Desa Payu.
  - 2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan kepala Desa Payu.

Pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan dihitung dalam volume 144 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) dalam sebulan. Rata-rata jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) perhari 4,8 sebagai acuan. Uraian tabel dalam bentuk program dan jumlah mahasiswa pelaksananya adalah:

**Tabel 2. Uraian pekerjaan, program dan volumenya dalam 2 bulan**

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)	Keterangan
1	Pengumpulan Data Luas Hutan	Survei	2880	10 orang mahasiswa
2	Identifikasi Luas Hutan Tanaman Industri	Survey/identifikasi	2880	10 orang mahasiswa
3	Mengatasi Masalah yang di timbulkan akibat dampak dari HTI	Laporan akhir	2880	10 orang mahasiswa
Total Volume Kegiatan			8640	30 orang

## **BAB IV**

### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, merupakan lembaga yang menaungi mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Sibermas (KKS-UNG) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran bagi mahasiswa tentang kondisi yang terjadi dimasyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah; Kuliah Kerja Sibermas (KKS).

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kegiatan pendampingan masyarakat melalui pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat kearah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan melibatkan peran serta Dosen, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membangun bangsa dan Negara. Akademisi selaku pengemban Tridharma Perguruan Tinggi dalam perannya meningkatkan pengabdian pada masyarakat bekerja sebagai penginisiatif kegiatan bertugas memetakan permasalahan dan pendataan dengan teknik pengumpulan data ilmiah dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat yang terkait dengan dampak Hutan Tanaman Industri bagi masyarakat.

Permasalahan yang telah dirumuskan menjadi rencana kegiatan dalam menentukan muatan materi yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah dampak dari Hutan Tanaman Industri oleh Tim Akademisi yang terlibat dalam kegiatan Kuliah Kerja Sibermas (KKS). Dalam kegiatan pengabdian ini Tim DPL akan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat serta pembuatan PETA batas wilayah Hutan Tanaman Industri.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi KKS**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Payu**

Pada tahun 1979 desa payu dulunya adalah desa diloniyohu kec. Paguyaman, pada tahun 1986 desa diloniyohu dimekarkan menjadi desa helumo, dan pada tahun 2003 desa helumo di pugar lagi menjadi desa payu. Penduduk desa payu mayoritas petani, baik petani ladang maupun petani kebun . Masyarakat petani dahulunya masih melakukan bercocok tanam dengan kebiasaan – kebiasaan tradisional. Adapun nama desa payu diambil dari sebuah sejarah dimana wilayah desa payu ada sebuah sejarah gunung tempat persinggahan yang dinamakan gunung payung sehingga nama desa dinamakan desa payu.

##### **2. Profil Desa Payu**

###### **a) Kondisi Geografis**

Secara administrasi Desa Payu terletak di wilayah Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, dengan keadaan geografis berupa daratan yang umumnya merupakan daerah persawahan, kebun, dan pemukiman penduduk dengan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Gorut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Potanga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Potanga dan Pilomonu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamaju

Desa Payu memiliki luas kurang lebih  $18 \text{ km}^2$  atau  $(1800\text{m}^2)$  terbagi dalam 5 dusun yaitu: Dusun Bihe, Dusun Pilomalula, Dusun Beringin, Dusun Harapan, Dusun ulinawa, pada Aspek Demografis pada tahun 2016 Desa Payu memiliki penduduk sejumlah 2195 jiwa. Dusun dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Dusun pilomalula Yakni 665 Jiwa, kemudian Dusun Beringin yakni 548 jiwa

###### **1. Perekonomian Desa**

Perekonomian di Desa Payu lebih di dominasioleh sektor Pertanian

###### **2. Data Bidang Sosial Budaya**

Jumlah, persebaran dan kepadatan penduduk , Jumlah penduduk Desa Payu Kecamatan Mootilango tahun 2016 sebesar 2195 Jiwa.

1) Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

**Tabel 1**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	502
2	Dagang	84
3	JasaAngkutan	7
4	Buruh	342
5	P N S	7
6	Karyawan swasta	63
7	Tukang	34
8	Wira Usaha	37
9	URT	271
10	Mahasiswa/pelajar	441
11	Tidak bekerja	16
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.818</b>

*Sumber data : Profil desa payu 2016*

2) Data bidang fisik dan prasarana Desa

Kondisi fisik jalan ada di Desa Payu dapat dirinci sebagai berikut: jalan butas aspal sepanjang kurang lebih 6 kilometer dan jalan pengerasan sepanjang kurang lebih 9 kilometer.

3) Jumlah hutan produktif dan tidak produktif serta kepemilikan individu dan kelompok

**Tabel 2**

Hutan		Kepemilikan	
Produktif	Tidak Produktif	Individu	Kelompok
<b>987</b>	<b>813</b>		

## **B. Hasil Capaian**

Landasan pembangunan kehutanan adalah pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-sebesar untuk kemakmuran rakyat. Garis-garis besar haluan negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Pembangunan kehutanan memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain dan serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan pelestari keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan dengan demikian, pembangunan kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial baik didalam maupun diluar hutan negara.

Hutan menurut Undang-undang nomor 41 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Manfaat hutan dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu :

Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan, dinikmati secara langsung oleh masyarakat antara lain berupa kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan seperti rotan, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung yaitu manfaat yang tidak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberasaan hutan itu sendiri seperti mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat bagi kesehatan, pariwisata, estetika dan membarikan manfaat dalam bidang pertahanan dan ketahanan. Namun, hal ini akan semakin sulit hutan alam yang potensinya makin menurun. Menurunnya potensi hutan alam antara lain disebabkan luas hutan makin berkurang, kerusakan hutan akibat kebakaran, pencurian kayu, perladangan secara berpindah-pindah, dan lain-lain. Dalam

rangka untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut, selain peranan sistem tebang pilih tanam indonesia (TPTI) pada hutan alam, maka pembangunan hutan tanaman industri (HTI) merupakan upaya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan bahan baku.

Beberapa prinsip munculnya pengelolaan hutan maupun lahan untuk hutan tanaman industri tersebut menimbulkan masalah-masalah baru dilingkungan masyarakat khususnya masyarakat setempat. Hal ini terjadi setelah lahan tersebut dikelola dan dikembangkan oleh pengusaha untuk mengembangkan hutan tanaman industri menjadi maju serta produktifitas lahan menjadi tinggi, masyarakat setempat dimana perusahaan itu berada mulai berduyun-duyun memperlakukan hal ini yang pada akhirnya akan berdampak terhadap lingkungan masyarakat itu sendiri. Dampak yang timbul dilingkungan masyarakat pada umumnya yaitu dampak sosial yang muncul sangat bervariasi dan beragam diantaranya adalah konflik atau sengketa kepemilikan lahan. Hal ini terjadi karena tidak beresnya tatanan administrasi dan kinerja para aparatur pemerintah mulai dari tingkatan paling bawah hingga ketingkatan tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin usaha. Pengusaha dan masyarakat dalam hal ini tidak dapat dipermasalahkan karena sebelum izin usaha yang dikeluarkan kepada pengusaha telah dilakukan verifikasi atau peninjauan lahan yang akan diberikan kepada pengusaha oleh pejabat pemerintah dari tingkat desa hingga kementerian kehutanan. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah mengapa didalam suatu luasan lahan konsensasi yang diberikan oleh pengusaha terdapat pemukiman penduduk yang tidak terdeteksi sehingga munculnya konflik dan bahkan tak jarang masyarakat yang telah lama mendiami daerah tersebut harus keluar karena izin usaha yang diberikan kepada masyarakat. Selain dampak sosial timbul, HTI juga menimbulkan kekeringan di wilayah yang berada dilingkungan HTI.

Adapun program –program yang berhasil dilaksanakan di Desa Payu antara lain :

#### **1. Penyuluhan tentang dampak HTI**

Tujuan penyuluhan terkait dampak HTI adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap dampak positif maupun dampak negatif yang timbul dari HTI. Adapun dampak positif dan dampak negatifnya yaitu :



- a) Dampak negatif hutan tanaman industri di Desa Payu
- Jumlah penduduk Desa Payu Kecamatan Mootilango tahun 2016 sebesar 2195 Jiwa, mayoritas mata pencaharian petani, Sebelum masuknya HTI di Desa Payu pada tahun 2011 keadaan kuota air mencukupi untuk semua lahan pertanian yang ada di Desa Payu akan tetapi setelah masuknya HTI di Desa Payu pada tahun 2013 kuota air yang mengalir dari hilir sampai ke Desa Payu kuota airnya kurang mencukupi lahan yang ada.
- b) Pembangunan HTI jika dilakukan dengan benar dan terarah, maka akan di dapatkan hasil keuntungan dan kelebihan:
1. Meningkatnya jumlah tenaga kerja dari penduduk sekitar dari penerimaan tenaga kerja
  2. Peningkatan perekonomian daerah sekitar perusahaan karena belanja perusahaan/tenaga kerja sehari-hari
  3. Corporate social responsibility jika dilaksanakan dengan benar maka masyarakat sekitar hutan dapat meningkatkan secara ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian yang berasal dari pemungutan hasil hutan yang dapat merusak hutan alam dan ekosistem hutan itu sendiri
  4. Masyarakat mendapatkan akses jalan untuk kebutuhan perekonomian dan memanfaatkan hasil hutan non kayu
  5. Pembangunan HTI dapat meningkatkan jumlah oksigen untuk mengurangi dampak karbon (tetapi hal ini perlu dikaji lebih mendalam, apakah ini hanya sebagai legitimasi untuk keberadaan HTI.

## **2. Hambatan/Permasalahan Dalam Program Kerja di Lokasi**

Setelah mengadakan kegiatan observasi selama dua minggu pertama, mahasiswa KKS menemukan beberapa hambatan/ masalah yang dihadapi di lokasi KKS, kemudian dapat di definisikan sebagai berikut :

- a) Kurangnya partisipasi sebagian masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan yang diadakan mahasiswa tentang dampak HTI

- b) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hutan tanaman industri.
- c) Kurangnya data didesa mengenai luas lahan hutan tanaman industri.

### **3. Solusi penyelesaian masalah HTI**

- a) Berdasarkan program inti yang telah dilaksanakan pada KKS pengabdian 2016 adalah penyuluhan Dampak Hutan Tanaman Industri. Pentingnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap Dampak positif maupun Dampak Negatif yang timbul dari HTI. Setelah diadakan evaluasi pada KKS pengabdian maka dihasilkan solusi dari Dampak HTI yaitu pengaktifan kembali P3A yang ada di Desa Payu dilengkapi dengan Payung Hukum, sehingga mempunyai dasar yang kuat bagi pengelola P3A. Fungsi dari P3A yaitu untuk membagi air ke setiap Dusun yang ada di Desa Payu lebih khususnya Dusun Bihe, Dusun Pilomalula, dan Dusun Ulinawa.
- b) Perlu adanya pendataan kembali terhadap lahan warga yang ada di lokasi HTI sehingga dapat membedakan mana lahan milik warga dan mana yang milik Negara.
- c) Perlu adanya Negosiasi antara Warga dan Perusahaan HTI melalui Pemerintah Desa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Hutan tanaman industri (HTI) adalah kawasan hutan produksi yang menerapkan budidaya kehutanan (silvikultur) secara intensif untuk memenuhi bahan baku industri kehutanan, baik kayu maupun non kayu. Di tengah semakin langkanya hutan produksi alam, HTI menjadi tumpuan produksi hasil hutan masa depan, Hutan tanaman industri diarahkan untuk dibangun di kawasan hutan alam yang tidak produktif lagi.

#### **B. Saran**

Seharusnya Pemerintah Desa dan Perusahaan HTI yang ada di Desa Payu lebih meningkatkan kerjasama dalam menyelesaikan persoalan dampak HTI yang ada di setiap Dusun di Desa Payu lebih khususnya di dusun Bihe, Beringin, dan Harapan. Selain itu, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam mengawasi dan mengontrol debit air yang masuk ke setiap Dusun sehingganya debit air yang masuk ke setiap Dusun dapat memenuhi kebutuhan lahan pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 1994, *Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap lingkungan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Epi Syahadat, 2013, Strategi Pembangunan Hutan Tanaman Di Provinsi Kalimantan Timur (*Development Strategy Of Forest Plantation In East Kalimantan Province*), Vol. 10.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Pokok-Pokok Kehutanan*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## DOKUMENTASI

**Gambar 1: Koordinasi dengan Aparat**



**Gambar 2: Turun Lokasi KKS**



**Gambar 3 : Observasi Lahan HTI**



**Gambar 4: Penyuluhan**



**Gambar 5: Penarikan Mahasiswa dari lokasi KKS**



## Lampiran 1. Format Biodata Ketua Tim Pelaksana

### KETUA

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Nirwan Junus, SH. MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Pembina / IVb
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19690602 200003 2 001
5	NIDN	0002066906
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 02 Juni 1969
7	E-mail	Nirwan14@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	085256320906
9	Alamat Kantor	-
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 0 Orang; S-2 = 0 Orang; S-3 = 0 Orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Negara
		2. Hukum Agraria
		3. Hukum Dagang
		5. Hukum Pajak
		6. Hukum Tata Negara
		7. Hukum Lingkungan

#### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Univ. Samratulangi Manado	Univ. Hasanudin	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Lulus	1993	2005	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Aspek-Aspek Hukum Adopsi Dalam Hubungannya Dengan Hukum Kewarisan Islam	Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto	
Nama Pembimbing/Promotor	Yahya Bin Smith, SH	Dr. Anwar Borahima, SH, .MH	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir****(Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (Juta Rp)
1	2012	Status Hukum Tanah Bantaran Danau Limboto di Provinsi Gorontalo	PNBP	10 Juta
2	2013	Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Provinsi Gorontalo	PNBP	25 Juta
3	2013	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo	DIKTI Tahun I	50 Juta
4	2014	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo	DIKTI Tahun ke II	48.122.500
5	2015	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI	105 Juta
6	2016	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI	225 Juta

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Penyuluhan Tentang Pelestarian	PNBP	7,5



		Danau Limboto di Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo		
2	2012	Instruktur PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru)	Diknas	4 juta
3	2012	Pelatihan Pembuatan Perdes Hewan Lepas Di Desa Batulayar Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo	PNBP	10 Juta
4	2014	Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan Tradisional Buili dan Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat Nelayan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai	DP2M- DIKTI	72 .500.000
5.	2014	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Pohe Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Pesisir pantai sebagai ajang tempat wisata	PNBP	25 Juta
6.	2015	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Pentingnya Membayar Pajak Di Desa Helumo Kab.Gorontalo Utara	PNBP	25 Juta
7.	2016	Inovasi Pemanfaatan Limbah Kotoran Ternak Melalui Fermentasi Sebagai Pupuk Dalam Mendukung Kelestarian Lingkungan Serta Implementasi Perda Hewan Lepas Dikabupaten Gorontalo	DP2M- DIKTI	70 Juta

**E. Publikasi Artiel Ilmiah Dalam Jurnal Alam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Perkembangan Hukum Pentanahan dan Eksistensi Pengakuan Hak Ulayat Menurut Hukum UUPA.	Jurnal Legalitas	Vol 1 Mei 2008.
2	Kebijakan Pertanahan di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip Hukum Tata Ruang.	Jurnal Legalitas	Oktober 2008
3	Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuai Amanat Undang-Undang Dasar 1945.	Legalitas	Februari 2009.

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar	Pertambahan Rakyat Di Gorontalo (dilihat dari Perspektif Hukum)	11 Oktober 2301 Hotel Jambura
2	Prosiding Seminar Nasional	Peningkatan Pengetahuan Hukum Nelayan Dalam Memanfaatkan Alat Penangkap Ikan Tradisional Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan	20 November 2014. Universitas Tarumanegara Jakarta.

**G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Agraria dan Perkembangannya di Indonesia	2011	119	Mandiri Publishing Gorontalo
2	Hukum Kehutanan	2013	77	Interpena
3	Problematika Pertambangan dan Solusi (Dilihat dari Perspektif Hukum)	2014	72	CV Budi Utama

**H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir**

No.	Judu/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-	-	-	-

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang Telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	-	-	-	-

**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satyalancana Karya Satya	Presiden	2013

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Pengabdian.

Gorontalo, 14 Oktober 2016

Ketua

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia	
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	
Tahun Lulus	2009	2009	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Daerah Tanggung Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo	Tinjauan Yuridis Terhadap Perikatan di Pengadilan Agama Limboto	
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Saifulin Prasanat, S.H.,M.H	Prof. Dr. Saifulin Nawi, S.H.,M.H	

*Nirwan Junus*  
**Nirwan Junus, SH., MH**  
 NIP. 19690602 200003 2 001

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan Sumber	Jumlah
1	2012	Tindakan penanaman dalam proses pembangunan pekarangan perikanan di Gajau dari pemanfaatan bakau alami	PNBP	7.500.00

## Lampiran 2. Format Biodata Anggota Tim Pelaksana

### RIWAYAT HIDUP ANGGOTA

#### A. Identitas Anggota Peneliti

1	Nama Lengkap dengan Gelar	Ismail H. Tomu, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/Identitas Lainnya	197706172009121003
5	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 17 Juni 1977
6	NIDN	0017067706
7	E-mail	-
8	Nomor Telepon/HP	085240306062
9	Alamat Kantor	Jalan Jendral Sudirman No. 6 Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752

#### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Lulus	2006	2009	-
Judul Skripsi/Tesis/Diseriasi	Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo	Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Limboto	-
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Samsudin Passamai, S.H.,M.H	Prof. Dr. Sahrudin Nawi, S.H.,M.H	-

#### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2012	Tindakan penahanan dalam proses penanganan perkara pidana di tinjau dari perlindungan hak asasi manusia.	PNBP	7.500.00

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Penyuluhan Hukum tentang Tindak Kekerasan Terhadap Kekerasan dalam Rumah tangga di Kec. Randangan Kab. Pohuwato	PNBP	500.000
2	2010	Penyuluhan Hukum pada warga Bone Pante tentang Perkawinan Dibawah Umur ditinjau dari UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan, tahun 2010 di Kec. Bone Pantai Kab. Bone Bolango	PNBP	500.000
3	2010	Penyuluhan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo	PNBP	500.000
4	2012	Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Tentang Hewan lepas di desa Batu layar	PNBP	7.500.000
5	2013	Pelatihan Pembuatan Surat-surat berharga menurut hukum keperdataan di Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo	PNBP	500.000
6	2014	Penyuluhan hukum tentang kewarisan islam dan implementasinya di desa Tupa Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango	PNBP	500.000
7	2014	Penyuluhan hukum tentang kesadaran pajak di Desa Limehe Barat Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo	PNBP	500.000
8	2014	Pelatihan Pembuatan peraturan desa dan Pelatihan Perancangan surat-surat perjanjian di Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo Kab. Gorontalo	PNBP	25.000.000
9	2015	Penyuluhan Mitra Kopolnas	Kopolnas	7.000.000

**E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Anak.	Jurnal Hukum Legalitas	Volume 5 Nomor 2 Oktober 2012
2	Kekerasan Rumah Tangga Persepsi Hukum Islam dan Hukum Positif	Jurnal Hukum Legalitas	Volume 6 Nomor 1 Februari 2013

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-	-	-	-

**H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Kegiatan	Tahun
1	-	-

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG.

Gorontalo, 14 Oktober 2016

Ketua



Ismail Tomu, S.N., MH  
NIP. 19690602 200003 2 001